

# KEBIJAKAN ASIMILASI PADA PERKEMBANGAN KOMUNITAS KETURUNAN ARAB DI SUMENEP (1967-1998)

Oleh: Ericca Nurdiana

Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang 5 Malang

Email: [ecko\\_coconut@yahoo.com](mailto:ecko_coconut@yahoo.com)

## **Abstrak**

Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membagi masyarakat Indonesia menjadi dua yaitu, pribumi dan non pribumi. Istilah non pribumi merujuk pada warga Negara Indonesia keturunan asing termasuk di dalamnya adalah keturunan Arab. Tahun 1967, berdasarkan Keppres No 240 tentang Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (termasuk keturunan Arab) dihimbau untuk mengikuti pembinaan asimilasi agar terhindar dari kehidupan rasial. Metode yang dipakai dalam penelitian ini meliputi heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi sumber (autentisitas dan kredibilitas), interpretasi (analisis dan sintesis) dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan surat kabar serta sumber lisan. Beberapa upaya dilakukan oleh komunitas keturunan Arab di Sumenep untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci** : Kebijakan Asimilasi, Komunitas, Keturunan Arab, Sumenep

## **Abstract**

In New Orde, the government issued the assimilation policy by dividing the Indonesian people into two groups; the natives and the innatives. Technical term of "innative" refered to Indonesian citizenship who were included descent foreign. At 1967, based on *KEPPRES No.240 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Asing* (including the Arabs) suggested to follow the establishment in order to avoided from racial life. The method used in this study is method of history which begins with heuristics, verification source (auntentisitas and credibility), interpretation (analysis and synthesis) and historiography. Use of this method makes the main data source is the archive of research papers issued by the government and newspapers also the oral resources. Some efforts had been done by the Arabs at Sumenep to adapt with the policy.

**Key Words**: Assimilation policy, Community, Arabs, Sumenep

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara yang besar. Hal itu ditandai dengan kemajemukan masyarakatnya. Keragaman Bangsa Indonesia disemboyankan dalam "*Bhineka Tunggal Ika*" (berbeda-beda tetapi satu) yang berarti terhimpunnya etnis menjadi satu bangsa (Mattulada;1999). Ada sekitar 500 etnis yang ada di Indonesia, diantaranya termasuk keturunan asing seperti Tionghoa, India, Arab, Eropa dan banyak yang lainnya. Fenomena tersebut terjadi karena kepulauan Indonesia pernah menjadi tempat singgah bangsa-bangsa Tiongkok, India, Arab, Parsi (*Foreign Asiatic*) sebagai pedagang. Pedagang asing tersebut akhirnya bermukim di Indonesia dan berintegrasi menjadi bangsa Indonesia, termasuk juga bangsa Arab (Fachruddin, 2005).

Keberadaan warga asing yang tinggal di Indonesia sudah cukup lama, terutama orang-orang Tionghoa dan Arab. Sebelum abad ke XIX, orang-orang Arab sudah banyak menetap di pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara seperti Aceh, Jepara, Pati, Tuban, Gresik, Banten dan beberapa di antaranya bahkan mempunyai pengaruh yang menentukan masa depan politis golongan pribumi dan pendirian koloni-koloni Arab. Kedatangan mereka tidak sekedar menyebarkan agama tetapi juga untuk mencari nafkah dan penghidupan. Pendapat itu didukung oleh Tibberts yang mengemukakan bahwa orang-orang Arab telah berdatangan di kepulauan Indonesia sebelum Islam mantap kedudukannya di kerajaan Melayu. Ahli ilmu bumi Arab paling awal dari abad IX menyebut kepulauan

ini dan laporan mereka menunjukkan adanya rute lautan yang terkenal dan sering digunakan (Algadri,1988).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh suatu sumber yang menyebutkan bahwa kedatangan mereka ke Nusantara sudah berlangsung sebelum agama Islam lahir. Pendapat itu dikemukakan berdasarkan suatu kisah dalam Al-Quran yang menyatakan mereka orang-orang Arab mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka mengadakan perjalanan ke Selatan, yaitu ke Yaman dan sekitarnya. Bahkan lebih jauh sampai ke pulau-pulau Nusantara. Kalau musim panas mereka melakukan perjalanan ke Utara yaitu ke Suriah malah sampai ke Eropa. Motif kedatangan orang Arab ke Indonesia sebelum abad ke VI untuk berniaga dan mengambil hasil buminya untuk diperdagangkan ke luar negeri (Yacub dalam Patji,1983). Hal ini menunjukkan sebelum abad tersebut sudah terjalin kontak antara orang-orang Arab dan masyarakat Nusantara.

Pada tahun 1870, di pulau Jawa terdapat enam koloni besar Arab yaitu di kota Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Sementara itu di Madura hanya ada satu yaitu di Kota Sumenep. Menurut Raffles dalam *History of Java*, Sumenep merupakan daerah yang memiliki jumlah pendatang asing yang cukup banyak dibandingkan dengan daerah Jawa dan Madura lainnya. Sejak pertengahan abad ke 19 memang di Sumenep banyak terdapat orang-orang Melayu, Tionghoa, Bali, Bugis, Makassar dan Arab yang kemudian sebagian besar berasimilasi dengan penduduk asli. Hampir dua pertiga

penduduk yang berasal dari luar Madura bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep. Berg (1989) dalam tulisannya *Le Hadhramout Et. Les Colonies Arabes dans L'Archipel Indien* mengatakan bahwa:

*“Mengalirnya orang Arab ke Sumenep juga disebabkan oleh kekaguman Priagung (Raden Tumenggung Abdurrachman Natakusuma II), yang memerintah kota itu dari tahun 1812-1854, terhadap orang Arab. Setelah Priagung itu mangkat, koloni Arab terus mengalami kemunduran, bukan dari segi penduduk melainkan dari segi kemakmuran. Kendatipun ada penurunan dari segi kemakmuran jumlah imigran mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.”*

Berdasarkan buku *Sejarah Sumenep* (2003), Raden Tumenggung Abdurrachman Natakusuma II adalah putra dari Panembahan Natakusuma I (Panembahan Somala). Pada saat menjadi Adipati, dia dilantik menjadi Sultan dengan sebutan Abdurrahman Pakunataningrat oleh Pemerintahan Inggris karena ketika itu Inggris berhasil merebut jajahan Belanda. Pada saat Sultan Abdurrahman Pakunataningrat berkenalan baik dengan Letnan Gubernur Jendral Inggris Sir Thomas Stanford Raffles, sebagai penguasa Inggris untuk wilayah Jawa dan Madura. Sultan Abdurrahman selain seorang Negarawan juga seorang ilmuwan yang dapat menguasai beberapa bahasa, antara lain bahasa Madura, Jawa Kawi, arab Sansekerta dan Belanda. Karena luas pengetahuannya di bidang kebudayaan, ia juga menjadi orang kepercayaan Raffles. Ia membantu dan memberi masukan ketika Raffles menyusun buku-buku ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya orang-orang Arab memiliki peranan yang cukup penting dalam kancah perdagangan di Nusantara. Mereka menjalin

kerjasama dengan penduduk asing lainnya seperti orang Tionghoa.

Menurut Kroef (1954) mereka adalah:

*“peddlers and merchants, who together with numerous other Oriental nationalities, constituted a commercial chain that reached from Egypt to China ( “para pedagang keliling dan saudagar, yang bersama dengan orang-orang dari kebangsaan lainnya, mengadakan hubungan dagang dari Mesir hingga Tionghoa” pent).*

Mereka, bersama orang Tionghoa, membentuk apa yang disebut dalam bahasa perdagangan *“tangan kedua”*, artinya mereka membeli barang dalam jumlah besar pada pedagang besar Eropa untuk kemudian menjualnya secara eceran, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Selain itu juga tampaknya orang Arab di Nusantara mengadakan hubungan dagang terutama dengan tanah airnya, Laut Merah dan Teluk Persia (Berg, 1989).

Alasan dibalik besarnya jumlah penduduk asing di Sumenep bisa dilihat dari potensi perekonomian kota itu sebagai pusat perdagangan garam (Syafi'i: 2011). Garam merupakan komoditi dan produk yang sangat penting yang dihasilkan di Sumenep. Sejak awal abad ke 20, Kota Sumenep merupakan wilayah yang menguntungkan karena pengaruh ekologi pesisir. Hal itu menjadikan Sumenep sebagai pusat perdagangan dan pengiriman garam ke wilayah-wilayah di Nusantara. Akibat dari aktifitas tersebut menimbulkan perkembangan transportasi dan menarik minat masyarakat untuk bermukim di sekitar pelabuhan. Sebagian penduduk asli di kota itu hanya menempati jalan-jalan dekat alun-alun dan di persimpangan-persimpangan jalan termasuk keluarga raja. Bangunan-bangunan yang terpenting adalah istana dan sebuah masjid, kota

perdagangan dan administratif yang Baru berada di Selatan. Keluarga-keluarga Arab, Tionghoa dan orang Eropa menempati bangunan-bangunan yang terletak di Kota Maringan. Rumah-rumahnya kebanyakan terbuat dari batu dan memiliki halaman berpagar (Kuntowijoyo, 2002) . Perbandingan besarnya jumlah penduduk asing di Kota Sumenep dengan kota-kota lain bisa dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk asing di Madura pada tahun 1930

Kabupaten	Pribumi	Eropa	Tionghoa	Timur Asing	Total
Bangkalan	45.196	286	1.177	234	101.087
Sampang	123.115	41	300	78	123.531
Pamekkasan	81.833	269	707	617	83.126
Soemenep	75.466	335	1.036	1.231	78.068

Sumber: Volkstelling 1930

Potensi perekonomian itu tentunya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Pelaksanaan sensus penduduk di Sumenep dimulai sejak pemerintahan Raffles tahun 1816, kemudian berlanjut hingga pemerintahan Belanda tahun 1930 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Sumenep tahun 1816-1930

Tahun	Jumlah Penduduk
1816	123.350
1845	184.408
1856	204.191
1857	205.205
1862	207.970
1867	210.218
1875	213.483
1880	227.630
1885	485.952
1930	626.882

Sumber: Koentowijoyo, 2002: 72

Dari keterangan Tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumenep pada masa pemerintahan kolonial mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Posisi Sumenep yang baik di sektor perdagangan boleh jadi secara ekonomis ikut mempengaruhi perkembangan penduduknya. Pelabuhan-pelabuhan penerima dan pelabuhan transit di Sumenep banyak menarik orang-orang asing. Penduduk asing di Sumenep hanya merupakan minoritas dibanding dengan penduduk asli. Jumlahnya sekitar 6,9% dari seluruh jumlah penduduk Sumenep. Bagaimanapun juga peranan kelompok minoritas ini dalam perekonomian di Sumenep sangatlah kuat. Orang-orang asing sebagai penghuni-penghuni tetap kebanyakan tinggal di bawah kepengurusan kepala mereka. Warga-warga asing dari Eropa, Tionghoa, Arab, India (Bengali) dan Moor serta Melayu. Orang-orang Tionghoa merupakan komunitas terbesar sedangkan Arab kedua (Jonge:1989).

Akibat dari banyaknya jumlah penduduk asing maka setiap etnis diberi tempat tinggal tersendiri dan tidak boleh bercampur satu sama lain serta setiap dari golongan itu berada di bawah kepemimpinan seorang kepala atau pemimpin Arab berpangkat *leutenat* dari golongan mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda.

Sejak abad pertengahan abad ke 19 memang di Sumenep banyak dihuni oleh orang-orang Melayu, Tionghoa, Bali, Bugis, Makassar dan Arab yang kemudian sebagian besar membaaur dengan penduduk asli. Algadri (1988) menjelaskan pada masa Kolonial, Pemerintah Kolonial Belanda membagi 3 strata masyarakat di Nusantara. Kelas paling atas

adalah warga (Eropa) *Europeanen* (Eropa, Amerika, Jepang dll), kelas dua warga Timur Asing (Arab, India, Tionghoa dll) dan kelas tiga adalah pribumi Indonesia. Ini merupakan kebijakan Belanda yang tercantum dalam *Regerings Reglements* 1857 tentang pelapisan sosial. *Regelings Reglements* menghasilkan *Exorbitante Rechten* yaitu hak bagi gubernur untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi tertentu. Hak tersebut dikatakan *exorbitante*, artinya khusus-istimewa karena menurut konsep hukum barat memang luar biasa dan tidak lazim. Penggolongan itu dimaksudkan karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku dan antar golongan etnis, sehingga untuk menghindari konflik antar ras mereka perlu ditunjuk tempat tertentu. Melalui hak istimewa ini, tercipta sistem pemukiman berdasarkan golongan etnis khususnya di Hindia Belanda dan di kota-kota besar. Sistem ini Baru terhapus pada awal abad ke 20 (Basundoro,2009).

Pada masa Kolonial orang-orang Arab dianggap ancaman oleh pemerintahan Belanda. Karena banyak dari orang-orang Arab yang setelah pulang dari menunaikan haji di Mekkah membawa pengaruh kepada penduduk setempat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda. Mereka tetap saja digolongkan sebagai orang asing hingga masa kemerdekaan RI. Penggolongan ini dikarenakan masalah identitas mereka yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Dikotomi pribumi dan non-pribumi yang semakin dipermasalahkan ditengah masyarakat menjadi dilema bagi Negara Indonesia yang



multietnis. Hal itu tidak mengherankan bahwa permasalahan pribumi menjadi relatif rumit karena hal ini disebabkan oleh perbedaan fisik dan karakteristik mereka. Adanya perbedaan tersebut rentan terhadap terciptanya kondisi kehidupan di lingkungan masyarakat tidak harmonis dan sering menimbulkan konflik di daerah serta dapat merembet pada konflik nasional.

Untuk mengatasi ketegangan itu maka pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing pada Pasal 3 berbunyi :

*Pembinaan warga Negara keturunan asing didjalankan dengan melalui proses asimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinya kehidupan eksklusif rasial.*

Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya persepektif negatif yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Adanya dikotomi pribumi dan non-pribumi yang ditujukan pada salah satu etnis atau warga Negara yang berkembang di tengah masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keutuhan Negara.

### **Metode Penelitian**

Tujuan studi ini adalah untuk menghasilkan tulisan sejarah, maka upaya untuk merekonstruksi masa lampau sebagai objek yang diteliti itu dilakukan melalui metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan sumber ), verifikasi (kritik sejarah,

keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintetis) dan penulisan (Gottschalk, 1986).

Tahapan pertama yang harus dilalui dalam penulisan sejarah adalah heuristik. Yaitu pengumpulan sumber yang berasal dari zaman yang bersangkutan berupa bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder. Sumber primer biasanya sumber tertulis seperti arsip dan majalah. Berikut sumber arsip yang penulis gunakan yaitu: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 berisi Tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 berisi Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber lisan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang dinilai relevan dengan tema yang dikaji. Peneliti memakai model *snowball sampling*. Istilah "*snowball sampling*" sudah diperkenalkan sudah sejak lama, namun Baru dipopulerkan oleh Goodman (1961) Coleman (1958) and Trow (1957). *Snowball Sampling* adalah yaitu suatu metode wawancara yang mengumpulkan informasi dari narasumber satu dan meminta rekomendasi dari narasumber tersebut untuk menemukan narasumber lainnya guna melengkapi data wawancara. Sejarah lisan digunakan karena pertimbangan dua hal. Pertama jika terbentur keterbatasan sumber tertulis, kedua karena penelitian ini merupakan kajian sejarah lokal maka ingatan manusia menjadi sangat penting sebagai bahan pembanding dari sumber-sumber dan fakta-fakta yang

sudah diperoleh. Sumber lisan adalah: Badar bin Umar Bahabazhy (50 tahun) adalah ketua Yayasan Pendidikan Al-Watonyah Al-Islamiyah. Bertempat di jalan Lontar Pangarangan Sumenep, Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri (64 tahun) adalah pengurus D.P.P Forum Peduli Alawiyyin, Nasar Yafi'I (55 Tahun) Pedagang alat-alat tulis, Abdul Kadir Bachmid (22 Tahun), Fainani Makki (22 tahun).

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber dapat ditempuh dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber tersebut dan terlebih pada hal-hal yang bersifat materil jenis kertas, stempel, bentuk huruf, tinta yang digunakan. Sedangkan kritik intern digunakan untuk mengetahui kredibilitas dan keakuratan sumber yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis hanya melakukan kritik interen. Kritik eksteren tidak dilakukan karena menurut penulis sumber-sumber seperti arsip, sumber penelitian dan buku-buku memang diperoleh dari tempat penyimpanan yang cukup kompeten. Kritik interen penulis gunakan semata-mata untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah dengan menggunakan sumber-sumber yang shahih.

Tahap ketiga yaitu interpretasi yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada (Hariyono, 1995). Interpretasi ini dilakukan tidak hanya deskriptif dan narasi saja tetapi juga dengan melakukan analisis. Interpretasi dilakukan berdasarkan pada objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu dengan

menggabungkan sumber-sumber data terutama data wawancara yang sudah diperoleh kemudian mensintesis sehingga interpretasi yang didapat bisa menjadi suatu rangkaian cerita sejarah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap keempat atau yang terakhir adalah penulisan. Membaca apalagi menulis sejarah bukanlah suatu hal yang mudah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia menggerakkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh. Hal inilah yang disebut historiografi. Menurut (Kuntowijoyo, 1995) dalam penulisan sejarah aspek kronologis peristiwa sangat penting. Hal itu dilakukan agar memperoleh alur cerita yang sistematis melalui penafsiran fakta yang telah diuji kebenarannya. Penulis menggunakan data-data primer yang sudah dihimpun berupa arsip dan sumber wawancara yang sudah diuji validitasnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

### **Pembahasan**

Di Indonesia masalah yang paling rawan terjadi sebagai konsekuensi dari kebhinekaan masyarakat adalah masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Masalah ras dan etnis akan menjadi sumber konflik jika tidak ditangani secara tepat. Karena rasisme terkadang memunculkan tindakan-tindakan serius seperti tindakan kekerasan,

bentrokan fisik, serta tindakan ekstrim lainnya (Kolipah, 2011). Istilah SARA mulai dikenal pada era Orde Baru. Pemerintahan yang syarat dengan karakter militer sangat menjunjung tinggi persatuan dan menginginkan segala sesuatunya sama bahkan menyangkut persoalan suku dan ras. Maka dari itu pemerintah menghendaki adanya persamaan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk menerapkan kebijakan asimilasi bagi masyarakat non pribumi bisa dikembalikan pada kondisi sosial politis di masa awal pembentukan Orde Baru. Tetapi sebenarnya sejarah muncul dan berkembangnya ide dasar asimilasi dapat dikembalikan lebih jauh lagi ke masa awal orang-orang pendatang (orang Arab, Tionghoa dll) yaitu pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan dan Orde lama.

Masalah pembauran bagi keturunan asing menjadi persoalan yang rumit bagi pemerintah. Hal itu tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru saja, di masa-masa sebelumnya terutama pada pemerintahan kolonial merupakan problema yang cukup serius dan mendapat perhatian yang utama. Hal itu cukup beralasan karena pemerintahan kolonial khawatir akan beralihnya dominasi ekonomi yang sudah mereka kuasai akan berpindah kepada pendatang-pendatang asing di samping karena misi penyebaran agama dan kebudayaan mereka. Sejak keberadaan para pendatang asing dianggap sebagai ancaman maka mulailah dibuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pendatang asing diantaranya adalah *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 163 yang membagi

pendatang asing menjadi tiga golongan yaitu golongan pertama adalah orang-orang Eropa, kedua orang-orang timur asing seperti tionghoa, Arab, India dll, ketiga orang-orang pribumi. Orang-orang Arab sebagai *Vreemde Oosterlingen* golongan timur asing yang dipisahkan dari mayoritas Islam. Masa kolonial merupakan masa-masa yang berat bagi keturunan Arab karena pemerintah kolonial membeda-bedakan masyarakat nusantara berdasarkan ras dan bangsa yang mempengaruhi pemikiran Nasionalis-nasionalis Indonesia (Algadri,1989).

Sejak ditetapkannya kebijakan asimilasi di segala bidang kehidupan bagi orang-orang Arab di tahun 1967, tidak serta merta kebijakan tersebut terlaksana dengan mudah. Butuh proses yang sangat panjang untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintahan orde baru dengan kebijakan asimilasinya. Keppres Nomor 240 Tahun 1967 bab II tentang *Pembinaan Warga Negara Indonesia Keturunan Asing* pasal 6 menyebutkan :

*“Warga Negara Indonesia keturunan asing diberi kesempatan yang sama dengan warga Negara Indonesia asli dalam mengerahkan daja dan dananja disegala bidang untuk mempertjepat pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara”.*

Ini berarti keturunan Arab diberi keleluasaan dalam mengelola dan mengeksplorsi kemampuan mereka serta mengembangkan kemampuan mereka untuk mempercepat asimilasi dalam bidang ekonomi.

Menurut Soekanto (1982), hal-hal yang mempercepat proses asimilasi diantaranya adanya toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai kebudayaan asing dan

kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran (amalgamasi), adanya musuh bersama dari luar. Akan tetapi ada kasus yang tidak berjalan pada kasus keturunan Arab di Sumenep yaitu perkawinan campuran (amalgamasi). Pengaruh kebijakan asimilasi keturunan Arab di Sumenep terlihat pada tiga aspek yaitu meliputi bahasa, pendidikan dan ekonomi.

### **1. Bahasa**

Manusia adalah makhluk sosial-budaya yang memperoleh perilakunya melalui belajar. Dari semua aspek belajar tersebut, komunikasi merupakan aspek terpenting dan paling mendasar. Melalui komunikasi manusia dapat berhubungan dengan lingkungan, serta mendapatkan pengakuan terhadap keberadaannya di sebuah kelompok sosial. Menurut Peterson, Jensen dan River (1965), komunikasi adalah pembawa proses sosial, alat yang dimiliki manusia untuk mengatur, menstabilkan, dan memodifikasi kehidupan sosialnya. Dalam hal ini bahasa sebagai alat komunikasi merupakan sarana yang efektif dalam menjalin interaksi sosial. Tujuan praktis dari bahasa adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, membina hubungan dan kerja sama, mengadakan transaksi, dan melaksanakan kegiatan sosial dengan bidang dan peran masing-masing. Pada kehidupan sehari-hari, orang-orang Arab di Sumenep menggunakan bahasa Madura. Ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang di luar etnisnya seperti orang Madura ataupun Tionghoa mereka juga menggunakan bahasa Madura.

Berkomunikasi dengan sesama orang Arab pun mereka menggunakan bahasa Madura. Bahasa Arab digunakan hanya sebagai selingan saja. Hal ini terlihat dalam komunikasi mereka di rumah, percakapan antar keluarga dan teman-teman, bahasa yang aktif dipakai adalah bahasa Madura. Akan tetapi ada beberapa dari keluarga Arab tertentu yang membiasakan berkomunikasi dengan keluarganya (anak-anaknya) menggunakan bahasa Arab. Hal itu dimaksudkan untuk memperlancar kemampuan bahasa Arab dan untuk memahami ajaran Islam, karena untuk belajar Islam secara mendalam tentunya harus menguasai bahasa Arab.

Dalam bahasa Madura terdapat tiga tingkatan bahasa yaitu *basa alos/enggi buntan*, *basa tengah/ enggi enten* dan *basa kasar/enje' iye* (bahasa kasar). *Basa alos/enggi buntan* (bahasa halus) digunakan ketika berkomunikasi dengan orang tua, sedangkan *basa tengah* dan *basa kasar* dipakai kepada teman atau kepada orang tua, seperti anak kepada orang tua. Orang-orang Arab kebanyakan menggunakan bahasa *tengah/enggi enten*. Bahasa *tengah* dipakai ketika mereka berbicara dengan teman sebayanya.

Contoh:

Orang Arab 1 : "*dhika dha'emma a yek?*"  
 "(kamu mau kemana *yek?*") *yek* adalah panggilan untuk orang Arab

Orang Arab 2 : "*bule neko entara ka pasar yek*"  
 "(saya mau ke pasar *yek*")

Sementara itu berbeda dengan pemuda *Ba'alawi* ketika bertemu biasanya mereka mencampur bahasa Arab dengan bahasa Madura.



Contoh:

Orang Arab 1: “ Antum dari jama’ah mana?  
“(kamu dari jamaah mana)”

Orang Arab 2: “Ana, Bafagih” “(Saya, Bafagih)”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Habib Zainal pada 25/08/2012. Pada waktu itu, penulis mencoba menanyakan kepada narasumber yang telah berusia 64 tahun, apakah bahasa ini masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Narasumber menjawab, tidak ada perubahan yang penting dalam bahasa Madura yang dipakai orang Arab, malah ada kecenderungan tetap.

Orang-orang Arab memanggil ayah dengan sebutan *abi*, ibu dengan sebutan *ummi* sedangkan kakek/ nenek dengan sebutan *jiddil/jidda*. paman/bibi dari jalur ayah *ammi/ammati*, paman /bibi dari jalur ibu adalah *halli /hallati*. Memanggil saudara yang lebih tua laki-laki/perempuan dengan sebutan abang/kakak. Sedangkan adik dengan nama panggilan.<sup>2</sup> Akibat interaksi sosial antara masyarakat keturunan Arab dan etnis lainnya (Madura, Tionghoa) terjadi kontak bahasa (*language contact*) dalam bentuk munculnya dua bahasa (*bi-lingual*) yang digunakan oleh tutur keturunan Arab di Sumenep. Percakapan sehari-hari biasanya orang-orang Arab mencampur bahasa Arab dengan bahasa Madura tengahan. Hal itu memang menjadi kebiasaan orang-orang Arab di Sumenep dalam berbahasa. Meski mereka sejak lahir sudah tinggal dan besar di Sumenep namun bahasa Arab tetap digunakan sebagai selingan dalam percakapan. Fungsi bahasa Arab yang semula sebagai bahasa pengantar dalam semua segi kehidupan komunitas keturunan Arab mengalami pergeseran. Kondisi tersebut berlanjut dengan digunakannya berbagai ragam bahasa seperti bahasa Madura dan Indonesia dalam setiap peristiwa komunikasi, seperti komunikasi di sekolah, lingkungan pekerjaan, rumah ataupun masyarakat yang mengakibatkan kemampuan berbahasa mereka semakin meningkat. Faktor-faktor yang diduga melatarbelakangi hal tersebut antara lain: (1) makin tingginya frekuensi interaksi akibat semakin membaiknya sistem komunikasi, (2) makin terbinanya kehidupan yang demokratis, (3)

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Habib Zainal (64 tahun) dan Abdul Kadir Bachmid (22 tahun) pada 25/08/2012 dan 8/2/2012. Dari dua narasumber tersebut ditarik kesimpulan yang sama bahwa cara pemanggilan kepada kerabat-kerabat keluarga Arab tetap sama meski antara dua narasumber tersebut berbeda generasi.

semakin tingginya tingkat mobilitas sosial (Poedjosoedarmo dalam Sholihatin, 2008). Kecenderungan menjalin hubungan perseorangan secara formal dan informal dengan menggunakan berbagai ragam bahasa terjadi antara orang-orang dari berbagai lapisan.

## **2. Pendidikan**

Orang-orang Arab di Sumenep memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan pendidikan Islam untuk anak-anak muslim. Sejak pemerintahan kolonial sudah terdapat sekolah madrasah yang diprakarsai oleh para *Habib*. Sekolah pertama yang didirikan adalah *Makarimun Akhlak*. *Makarimun Akhlak* berarti membina *akhlak*, jadi pendirian madrasah itu bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan *akhlak* yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. (Wawancara dengan *Habib* Ali Zainal Abidin Al Jufri tanggal 25 Agustus 2012).

Pada masa orde baru sekolah madrasah yang berkembang adalah Madrasah YPAA (*Yayasan Pendidikan Al Watoniyah Al Islamiyah*). Sekolah ini adalah sekolah keluarga yang dirintis oleh seorang Arab *Masyayekh* bernama *Syaikh* Ahmadun bin Ahmad Bahabazhy. Beliau adalah salah satu murid datuk dari *Habib* Ali Zainal Abidin Al Jufri. *Syaikh* Ahmadun bin Ahmad Bahabazhy pernah menjabat sebagai sekretaris kapten Arab, namun tidak diketahui periode jabatannya. Perhatiannya memang dicurahkan untuk pendidikan Islam. Mengingat akan pentingnya pendidikan Agama untuk anak-anak dan cucu-cucunya maka beliau mendirikan sekolah keluarga itu.

Pada awalnya yang menjadi murid-murid dari *Syaikh Ahmadun* adalah anak cucunya sendiri. Tujuan awal dari adanya sekolah keluarga itu memang untuk mengajarkan anak cucunya tentang ilmu Agama. Lama kelamaan banyak rekan dan tetangga dari *Syaikh* yang juga menitipkan anak-anaknya untuk diajar Agama. Awalnya *Syaikh* menolak, karena beliau hanya ingin mengajarkan anak cucunya belajar Agama. Tetapi pada akhirnya *Syaikh Ahmadun* bersedia. Anak-anak *Syaikh* yang sudah mumpuni keilmuannya dikader untuk dijadikan pengajar. *Syaikh Ahmadun* menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat belajar. Mulai dari ruang depan, kamar hingga ke dapur semuanya tak luput dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu terus berlanjut hingga *Syaikh Ahmadun* tutup usia pada tahun 1973.

Sepuluh tahun setelah wafatnya *Syaikh Ahmadun* muncul inisiatif dari anak-anak (keluarga) *Syaikh Ahmadun* untuk mengembangkan sekolah itu. Pada tahun 1983, pihak keluarga dari *Syaikh Ahmadun* mendirikan yayasan yang bernama *Yayasan Pendidikan Al Watoniyah Al Islamiyah* (YPAA). Atas persetujuan ahli waris rumah *Syaikh Ahmadun* dibangun menjadi madrasah. Pembangunan sekolah itu bertahap sedikit-demi sedikit hingga menjadi sempurna seperti sekarang ini. Sekolah ini mengalami renovasi pada tahun 1997. Bertambahnya jumlah murid adalah salah satu pendorong adanya penambahan bangunan. Kelas-kelas ditambah dengan membangun satu lantai lagi di atasnya.

Pihak yayasan bisa dibilang cukup mandiri dalam menjalankan sekolah ini. Mereka tidak terikat dengan pemerintah ataupun bergantung

pada bantuan pemerintah. Yayasan mencari dana sendiri dalam membangun madrasah. Meskipun tidak ada dana, sekolah pun tetap berjalan. Pada dasarnya yang membuat sekolah itu tetap bertahan adalah semangat dakwah dari para pengurus yayasannya serta kekuatan jaringan berwujud ikatan silaturahmi dan ikatan alumni madrasah.

Ada banyak sekali donator dermawan yang bersedia membantu untuk memajukan sekolah YPAA. Ustad Badar selaku pimpinan yayasan menuturkan bahwa ketika itu tahun 1997 bertepatan dengan bulan Sya'ban ada seorang berkebangsaan Yaman bernama *Syaikh* Abdullah Ba'ardhah mengadakan kunjungan ke Sumenep. Sebenarnya kunjungan itu karena beliau sedang mengunjungi kerabatnya yang ada di Sumenep. Namun ketika melihat-lihat sekolah YPAA, *Syaikh* Abdullah bertanya kepada Ustad Badar "*berapa yang dibutuhkan untuk merenovasi sekolah ini ?*". Kemudian *Syaikh* Abdullah ikut berpartisipasi menjadi donatur demi terselesainya pembangunan gedung sekolah.

Selain berupa uang, bantuan untuk sekolah YPAA juga bahan-bahan material. Ada seorang pengusaha teman dari Ustad Badar yang memberikan kayu jati dengan jumlah yang sangat banyak untuk bahan tambahan membangun sekolah. Padahal harga kayu sangat mahal, bahkan pengusaha itu berpesan jika ada kekurangan dalam bahannya bisa menghubunginya lagi. Jadi dalam hal ini kekuatan jaringan sangatlah berperan dalam proses mengembangkan dan memajukan sekolah YPAA. Kebanyakan anak-anak *Syaikh* Ahmadun mendirikan juga sekolah madrasah seperti di Kediri, Cirebon, Jakarta, Banten dan Pasuruan.

Prestasi Alumni YPAA bisa dibilang cukup baik. Karena dari beberapa alumni ada yang diterima di Yaman, dan beberapa diantaranya menjadi tokoh politik seperti Said Abdullah (Anggota DPR) dan Dirjen Pendidikan.

Setiap bulan Syawal tanggal 3 keluarga besar pendiri YPAA (anak-anak *Syaikh Ahmadun*) mengadakan pertemuan rutin tiap tahunnya. Pertemuan itu untuk menyambung silaturahmi dan sekaligus juga laporan tahunan atas perkembangan yayasan. Selain dalam pelajaran Agama, yayasan membentuk klub sepak bola untuk murid-murid YPAA. Jadi pelajaran olahraga pun diperkenalkan di sekolah ini.

### **3. Ekonomi**

Sejak abad ke XV, orang-orang Arab selalu bersaing dengan orang-orang Tionghoa dalam hal perdagangan. Pada kehidupan ekonomi keturunan Arab hukum yang berlaku bagi mereka adalah perjuangan, kemandirian dan kemerdekaan. Itu sebabnya mayoritas keturunan Arab banyak yang menjadi pedagang dibandingkan dengan pegawai pemerintah. Meski saat ini cukup banyak juga dari mereka yang memasuki berbagai macam bidang pekerjaan, namun jumlah mereka tidak sebanding dengan yang menggeluti bidang ekonomi dan perdagangan.

Persaingan itu pun masih berlangsung hingga 1990an. Mayoritas warga keturunan Arab lebih memilih jalur perdagangan sebagai mata pencaharian dan kebutuhan ekonomi. Beberapa diantara mereka menjalankan usaha dagang seperti material bangunan, bengkel motor, *furniture* rumah tangga, usaha foto copy dan alat tulis, toko batik dan

pakaian, *boutiq* baju muslimah, toko buku, minyak wangi dan minyak serta usaha restoran.

Secara umum usaha yang dijalankan oleh orang-orang Arab adalah usaha turun temurun. Meski telah meraih gelar sarjana biasanya mereka lebih memilih untuk menjalankan usaha keluarga. Hal itu menjadi salah satu penyebab orang-orang Arab tidak banyak bekerja di bidang pemerintahan. Tak sedikit dari orang-orang Arab yang membuka usaha toko baju muslim, padahal dari segi jumlah, toko yang menekuni usaha yang sama pun cukup banyak ditambah dengan lokasinya yang berdekatan. Hal itu menunjukkan dalam hal ekonomi (perdagangan) orang-orang Arab sangat berani mengambil resiko. Mereka sangat percaya diri dengan menginvestasikan modal mereka melalui usaha yang mereka jalankan (Patji, 1982).

Di era orde baru, komunitas keturunan Arab tidak menemui kesulitan dalam mengurus perijinan membuka usaha. Semuanya dipermudah dan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh bapak Nasar (keturunan Arab) yang membuka toko ATK (alat tulis kantor) sejak tahun 1993. Dia menerangkan :

Pada tahun itu buka usaha disini gampang dan mudah mencari pelanggan. Karena masih sedikit saingannya. Waktu saya masih buka usaha dulu masih ada 9 tempat seperti; Gunawan, El Malik, toko saya, pak Biyanto, pak haji Munawar, *Kon-rokon*, Bintang Sakti, toko Dewi. Mengurus perijinannya juga gampang. Kalau sekarang sulit sekali mulai dari pemasukan atau pelanggan. Masih lebih enak waktu jamannya pak Harto, fotocopy perlembar Cuma 20-25 rupiah dan harga-harga barang masih stabil. Apalagi sekarang dari 9 tempat meningkat jadi 146 tempat.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara warga keturunan Arab ataupun bukan, mereka sama-sama mendapat kesempatan yang sama tergantung dari seberapa besar usahanya. Pada kasus keturunan Arab di Sumenep, asimilasi yang terjadi pada aspek ekonomi bisa dilihat dari faktor perimbangan dalam aspek ekonomi. Maksud perimbangan ialah adanya kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi bagi golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Masing-masing individu dari setiap golongan etnis mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya.

Dalam prakteknya ternyata kebijakan asimilasi untuk keturunan Arab tidak berjalan dengan sempurna. Karena di beberapa aspek keturunan tidak bisa membaur sepenuhnya. Menurut Soekanto (1982), ada beberapa faktor yang memperlambat jalannya asimilasi yaitu kelompok yang terisolasi (*terasing*), kurangnya pengetahuan tentang budaya yang dihadapi, prasangka negatif terhadap kebudayaan baru, perasaan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan lain, perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan dan warna kulit serta rambut, perasaan yang kuat (*in group feeling*) bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan, golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa, kadangkala faktor perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi juga dapat menyebabkan terhalangnya proses asimilasi. Aspek-



aspek yang kurang dimanfaatkan dalam proses asimilasi adalah aspek politik, budaya dan pernikahan (amalgamasi).

### 1. Politik

Orang-orang keturunan Arab di Sumenep, baik itu dari Arab *Ba'alawi* ataupun *Masyayekh* tidak terlalu berminat untuk terjun ke dalam dunia politik. Mereka lebih suka bergerak di bidang ekonomi (perdagangan) dan pendidikan bahkan bisa dibilang terlalu memfokuskan pada bisnis (*business oriented*). Jika organisasi sejenis *Al Khayriyah* ataupun *Al Irsyad* ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Pekalongan dan Surakarta maka jauh berbeda kondisinya dengan di Sumenep. Ustad Badar menjelaskan :

Kalau masalah organisasi orang-orang Arab kurang tertarik. Ambil contoh misalnya sesuatu yang menjadi perekat keturunan Arab semisal perkumpulan gambus. Gambus itu disenangi dimanamana kalau ada mantenan pasti ada gambusnya. Itu mau dibuat perkumpulan susahny setengah mati, tapi ketika dengar bunyinya sudah kumpul itu. Makanya dulu sampai pernah ada datang utusan dari kedutaan Saudi sama Yaman menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus, dikumpulkan semua itu apa masih ada tradisi dari nenek moyangnya itu. Itu nggak pakai undangan Cuma diberitahu dari mulut ke mulut kalau ada utusan dari kedutaan Yaman dan Saudi karena mau dipelajari karena di Negara asalnya sudah agak jarang kecuali di daerah pedalaman. Itu ngumpul semua dibiayai oleh mereka. Termasuk politik mereka nggak begitu tertarik dengan politik.

Menurut Ustad Badar beliau pernah mendirikan organisasi pada tahun 2004. Organisasi itu tidak terbatas hanya untuk keturunan Arab saja, siapapun termasuk masyarakat lokal boleh bergabung. Namun organisasi itu hanya seumur jagung. Karena kesibukan para pengurusnya pada bisnis, organisasi ini bubar empat tahun kemudian. Di kalangan

*Ba'alawi* pun jarang yang bergabung dalam dunia politik. Menurut *Habib*

*Zein* dikalangan *Ba'alawi* tidak berpolitik. Beliau menjelaskan :

Kalau *Habaib* tidak mau berpolitik. Kalau kita berpolitik akhirnya imannya dangkal. Politik itu menghancurkan kita sendiri, berarti kalau ada politik ada ide partai, jadi hanya partainya yang dikembangkan, yang lain nggak bakal dikembangkan. Semuanya merebut kedudukan. (Wawancara dengan *Habib* Ali Zainal Abidin Al Jufri tanggal 25 Agustus 2012).

Pada tahun 2001 *Habib Zein* pernah juga mendirikan organisasi *Arrabitah* cabang pertama di Sumenep. *Habib Zein* menjabat sebagai ketua organisasi tersebut.

Dulu saya memang menjadi pendiri cabang *Ar Rabitah* yang pertama di Sumenep pada tahun 2001. Saya menjabat sebagai ketuanya. Yang penting ada wadah dulu. Sebelum itu belum ada organisasi sejenis yang didirikan. Kalau saya pribadi tidak butuh itu, yang penting ada wadah. Sedangkan yang lain ingin ada papan (maksutnya nama resmi *pent*). Kalau ada papan dikhawatirkan ada perselisihan antara *Ba'alawi* dengan *Masyayekh*. Tetapi karena saya ada darah *Masyayekh*, tidak ada masalah saya membentuk organisasi ini, saya bisa keluar ke dalam. Tetapi kalau tidak ada yang terkait dengan *Masyayekh* jangan coba di Sumenep ini, karena lebih banyak *Masyayekhnya*. *Habaibnya* bisa dihitung, Cuma untungnya *Masyayekh* di Madura ini sama dengan kita (dari segi pemahaman *pent*). Organisasi *Arrabitah* tetap aktif hingga sekarang. Namun tidak berjalan dengan baik karena beberapa sebab salah satunya karena bisnis yang ditekuni oleh para pengurusnya. (Wawancara dengan *Habib* Ali Zainal Abidin Al Jufri tanggal 25 Agustus 2012).

Hingga sekarang organisasi itu tetap berdiri meski tidak berjalan dengan baik. Karena kesibukan para pengurusnya pada bisnis yang dijalankan menyebabkan kinerja organisasi tersebut tidak bisa maksimal. Sehingga dari keterangan itu bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya orang-orang Arab di Sumenep tidak terlalu suka menyibukkan diri pada dunia politik karena hal itu bertentangan dengan jiwa mereka sebagai

wirausahaan. *Business oriented* tetap menjadi prioritas utama bagi sebagian besar orang-orang Arab di Sumenep.

## 2. Pernikahan

Pernikahan adalah proses peralihan dari seorang manusia yang hidup dalam tingkat remaja ke dalam tingkat keluarga. Pernikahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan adalah jenjang untuk membentuk rumah tangga demi keturunannya. Frekuensi perkawinan antar orang Arab di Sumenep masih cukup tinggi.

Kebanyakan komunitas keturunan Arab di Sumenep melakukan perkawinan endogami. Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara seorang pria atau seorang wanita kawin yang masih dalam lingkungan kerabat. Dalam sistem endogami, kawin dalam sukunya sendiri selain suatu kaharusan juga kebiasaan (Kusuma, 2003). Ustad Badar menjelaskan :

Kalau yang saya amati frekuensi pernikahan sesama Arab masih tinggi. Dari orang tua-tua yang dulu itu berpesan seperti ini “*Dzur fi at- thoriq walau dzarat* (kalau kamu jalan hendaklah kamu berputar supaya kau tahu pengalaman. “*Fi at- tal’ amu walau dzarat*” (kalau mau kawin jangan cari orang lain sepupumu dulu yang mengawini sepupumu siapa, kalau tidak kamu).

Pada umumnya dalam memilih jodoh orang-orang keturunan Arab memiliki pembatasan. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dalam memilih suami atau istri, terutama untuk kalangan *Ba’alawi*. Konsep *kafa’ah* melahirkan fatwa pelarangan pernikahan antara wanita *syarifah* dengan non *Sayyid*. Almasyur (2002) mengartikan *kafaah* adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam perkawinan yang dimaksud *kufu’* yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan,

sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak kekayaan dan keturunannya. Hal ini dikatakan oleh *Habib* Ali Zainal sebagai ketekunan dalam berkeluarga.

Bagi kalangan *Ba'alawi* makna pernikahan berkaitan erat dengan usaha menjaga nama baik keluarga secara turun temurun. Menurut Rachman (2011), pernikahan sebagai alat untuk mempertahankan dan menjaga keturunannya serta sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan orang tua. Tidak berbeda dengan masyarakat Jawa, dalam lingkungan *Ba'alawi* kriteria memilih jodoh juga diperhitungkan unsur *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Biasanya sebelum upacara lamaran orang tua kedua belah pihak mengadakan seleksi. Fungsi silsilah sangat menentukan, ada kecenderungan *Habib* menikahkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan kerabat. Minimal beda marga. Adat pernikahan yang ideal menurut mereka adalah antara seorang pria dengan gadis anak saudara wanita ayah (bibi) atau disebut *cross cousin marriage* sehingga cenderung bersifat *endogamy fam*.

Dalam ketentuan pernikahan *Ba'alawi* seorang *syarifah* tidak diperkenankan untuk menikah dengan selain *Sayyid*. Sedangkan seorang *Sayyid* masih diperbolehkan menikah dengan bukan *syarifah* meski hal itu meski bagi mereka hal itu sesuatu yang kurang pantas. Bagi seorang *syarifah* harus menjaga nasabnya. Apabila *syarifah* menikah dengan selain *sayyid* maka dia tidak memiliki (*ta'dhim*) mengagungkan dan rasa hormat kepada Rasulullah SAW. Terhapuslah arti kecintaan kepada beliau, sebab tindakannya mengganggu, merusak dan memutuskan

hubungan nasab dengan beliau (Ali, 2011). Jika hal itu dilanggar maka baik *syarifah* ataupun *Sayyid* nya akan kena hukuman. Sangsi bagi *syarifah* jika menikah dengan yang bukan *Sayyid* adalah dikeluarkan dari marganya dan dikucilkan keluarga sedangkan bagi *Sayyid* yang menikah dengan selain *syarifah* harus menikahi tiga *syarifah* sekaligus. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada perbedaan antara *syarifah* ataupun *Sayyid* yang melanggar ketentuan pernikahan di kalangan *Ba'alawi*.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan asimilasi yang ditetapkan pada masa orde baru hanya berdampak pada tiga aspek penting yaitu bahasa, pendidikan dan ekonomi. Bahasa Madura sebagai alat komunikasi yang sangat efektif bagi komunitas keturunan Arab di Sumenep untuk berkomunikasi dengan masyarakat khususnya orang Madura agar dapat berhubungan dengan lingkungan, serta mendapatkan pengakuan terhadap keberadaannya di sebuah kelompok sosial. Selain itu juga dampak pendidikan (madrasah) dan ekonomi membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat lokal Sumenep. Karena didirikannya madrasah tersebut membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ilmu agama untuk anak-anak mereka. Konsentrasi keturunan Arab dalam bidang perdagangan membantu menyeimbangkan kegiatan perekonomian di Sumenep. Karena sebagian masyarakat lokal Sumenep lebih banyak bekerja di sektor pemerintahan dan perkantoran.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto (1998) memberikan harapan baru bagi keturunan Asing khususnya keturunan Arab untuk terbebas dari

segala macam bentuk diskriminasi. Presiden Habibie ketika itu mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 yaitu menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Arsip

1. *Volkstelling 1930 Java and Madoera*
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Pasal 3.
3. Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

### Buku

- Al gadri, Hamid. 1988. *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Almanyur, Idrus Alwi. 2002. *Sekitar Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syariahnya*. Jakarta: Yayasan Almustarsyidin
- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kolonial*. Yogyakarta: Ombak
- Berg, Van den. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*. Jakarta : INIS
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kroef, Van de. 1954. *Indonesia In Modern World*. Bandung: Masa Baru.
- Koentowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris : Madura 1850- 1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mattulada, H.A. 1999. *Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia Prospek Budaya Politik abad ke-21*. Antropologi Indonesia. XXIII No 58

Raffles, Thomas. 2008. *History of Java*. Yogyakarta: Narasi.

Soekamto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penulis. 2003. *Sejarah Sumenep*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep.

### **Laporan Penelitian**

Patji, Abdul Rahman. Juni 1983. *Asimilasi golongan Etnis Arab (Suatu Studi Lapangan Kelurahan Ampel Surabaya)*. Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia jilid X no 1. Jakarta: LIPI.

Salindri, Dewi. 1989. *Gambaran Umum Tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Arab*. Departemen Pendidikan Kebudayaan RI. Universitas Jember .

### **Skripsi dan Thesis**

Sholihatini, Anis. 2008. *Pemilihan Kode pada Masyarakat Keturunan Arab di Noyontaan, Kota Pekalongan: Kajian Sosiolinguistik*. Thesis: Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro

Syafi'i, Imam. 2011. *Persaingan Pengangkutan Garam Di Selat Madura Tahun 1924-1957*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Malang.

Rachman, M. Faisal. 2010. *Bentuk-bentuk Pemitosan Habib dalam Keberagaman Sebagian Kyai dan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 1980-2005*. Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Diponegoro Semarang.

### **Majalah, Makalah, Jurnal dan Artikel**

Fachruddin, Chalida. 2005. *Orang Arab di Kota Medan*. FISIP USU: Etnovisi Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Vol 1 No 3 Desember Hal 130-135.

Jonge, de Huub. 1989. *Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1680-1883*. Dalam Jonge, Huub de (Ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi Studi-*



*studi Interisipliner Tentang Masyarakat Madura* (hlm 1-30). Jakarta : Rajawali Press.

### **Narasumber**

Badar bin Umar Bahabazhy (50 tahun) adalah ketua Yayasan Pendidikan Al-Watonyah Al-Islamiyah.

Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri (64 tahun) adalah pengurus D.P.P Forum Peduli Alawiyin,

Nasar Yafi'l (55 Tahun), Pedagang alat-alat tulis,

Abdul Kadir Bachmid (22 Tahun), Karyawan

Fainani Makki (22 tahun), Mahasiswa